

PERBANDINGAN TINGKAT KETERKENDALIAN PENGUNAAN BAHASA RUANG PUBLIK LEMBAGA SWASTA DI KABUPATEN GIANYAR

Sang Ayu Putu Eny Parwati

Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra BRIN

ayuparwati1974@gmail.com

Abstrak: Penguatan bahasa asing disebabkan oleh kenyataan arus informasi dan komunikasi global yang makin deras bersamaan dengan mobilitas penduduk antarnegara yang makin intens. Ketika arus informasi dan komunikasi serta mobilitas penduduk seperti itu terjadi di wilayah NKRI, bahasa asing cenderung muncul mendesak bahasa negara di ruang publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik pada lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata dan pendidikan di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan teknik pengumpulan dokumen penggunaan bahasa ruang publik pada lembaga swasta. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan langkah penjenisan data, penyeleksian data, penilaian berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan, dan pengategorian. Sampel data ditentukan sebanyak 5 lembaga swasta, yakni 3 lembaga swasta bidang pariwisata dan 2 lembaga swasta bidang pendidikan. Berdasarkan pada kriteria peringkat keterkendalian, Kabupaten Gianyar dikategorikan sebagai wilayah terkendali C. Hal ini berarti penggunaan bahasa pada lembaga swasta bidang usaha dan lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Gianyar kurang terkendali. Secara fisik penggunaan bahasa asing masih mendominasi pada media ruang publik lembaga usaha, sedangkan pada lembaga pendidikan penggunaan bahasa asing tidak terlalu dominan, tetapi tipografi media tersebut tampak sangat sederhana.

Kata Kunci: keterkendalian, bahasa ruang publik, lembaga swasta.

Pendahuluan

Kabupaten Gianyar terkenal sebagai salah satu wilayah tujuan wisata yang ada di Bali dengan beragam tempat wisata dan jasa pelayanan yang ditawarkan untuk para wisatawannya. Selain itu, Kabupaten Gianyar juga menjadi salah satu kabupaten yang sangat menjunjung tinggi adat, seni, dan budaya Bali sehingga gambaran fenomena aktivitas masyarakatnya dalam berbagai hal bersifat multidimensi, termasuk gambaran tentang bahasa luar ruang yang berhiaskan dengan beragam bahasa, selain bahasa Indonesia. Hal tersebut sepertinya bertentangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, Pasal ayat (3) yang khusus mengatur tentang penggunaan bahasa media ruang publik. Selain penggunaan bahasa, bentuk fisik dari media yang dimaksud juga tak dapat lepas dari seni dan budaya masyarakat setempat.

Fenomena penggunaan bahasa ruang publik di beberapa wilayah di sebelumnya telah dikaji, di antaranya oleh Wulansari (2020) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa

pada papan nama usaha di beberapa wilayah di Bali adalah bahasa Inggris paling dominan, lalu penyertanya adalah bahasa Indonesia, aksara Cina, atau aksara Bali. Bahasa-bahasa tersebut mewarnai papan nama tempat-tempat wisata dan usaha dagang yang ada di Bali. Sejenis dengan penelitian tersebut, Dany Ardhian, Soemarlani (2018) mengungkap tentang dominasi pilihan kode bahasa tertentu dan aksara yang digunakan sebagai perlambang dominasi sosial kelompok tertentu di masyarakat dalam area publik. Kedua penelitian tersebut tidak menjelaskan secara rinci aspek kebahasaan yang ditemukan pada data yang ditunjukkan pada hasil penelitian dan tidak mengategorikan tingkat keterkendalian penggunaan bahasa media ruang publik pada wilayah penelitiannya.

Untuk dapat mengetahui tingkat keterkendalian dan penggunaan bahasa di ruang publik yang diproduksi oleh lembaga swasta di Kabupaten Gianyar maka penelitian ini mengangkat masalah berikut.

- 1) Bagaimana tingkat pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ruang publik pada lembaga swasta di Kabupaten Gianyar.
- 2) Bagaimana penggunaan bahasa ruang publik pada lembaga swasta di Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat tentang penggunaan bahasa (bahasa Indonesia) pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, atau sejenisnya yang ditemukan di ruang publik yang diproduksi oleh lembaga swasta yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dengan mengakumulasi nilai pada setiap aspek penelitian sehingga dapat ditetapkan tingkat keterkendalian penggunaan bahasa pada data yang ditemukan di lokus penelitian. Sementara itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada pihak terkait untuk (a) pengendalian penggunaan bahasa pada lembaga swasta agar mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia serta menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar di ruang publiknya, (b) memberdayakan semua lembaga swasta untuk ikut serta mengembangkan dan membina bahasa Indonesia secara terus menerus dalam kehidupan lembaganya, dan (c) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan lembaga swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada lima lembaga swasta yang menjadi sumber data penelitian ini, yaitu sebanyak tiga lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan (hotel) dan dua lembaga pendidikan swasta yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar. Kelima lembaga tersebut adalah Hotel Gianyar, Sapulidi Resort Spa & Gallery Bali, Nirmala Hotel, SMA Dwijendra Gianyar, dan SMK Saraswati 1 Gianyar. Data penggunaan bahasa ruang publik di setiap lembaga dipilih sebanyak sepuluh model data yang mewakili tujuh objek pengamatan yang berjumlah lima puluh data. Namun, data yang dinilai dalam tabel instrumen penilaian hanya berjumlah sepuluh data sebagai perwakilan setiap aspek penilaian yang dilakukan secara acak.

Materi dan Metode

Kajian tentang bahasa di ruang publik merupakan objek kajian lanskap linguistik atau *Linguistic Landscape* sebagai kajian interdisipliner atas kehadiran berbagai isu bahasa yang berinteraksi dengan bahasa lain di dalam ruang publik yang bersinggungan dengan konsep sosiolinguistik, multilingualisme, kebijakan bahasa, geografi budaya, semiotik, sastra, pendidikan, dan psikologi sosial (Puzey, 2016). Erikha (2018:39) menyatakan bahwa lanskap linguistik berurusan dengan situasi dan fakta kebahasaan ragam tulis yang ditemukan di sebuah kawasan, tempat, ataupun ruang sosial. Bahasa ragam tulis tersebut berupa papan reklame/toko, penunjuk arah, ataupun poster yang dapat dilihat di ruang publik. Namun, objek penelitian ini adalah penggunaan bahasa yang ada pada papan nama dan papan penunjuk yang diproduksi oleh lembaga swasta dan lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar. Papan nama dapat dikatakan sebagai papan yang dipasang di depan rumah atau kantor yang bertuliskan nama (orang, organisasi, lembaga, perusahaan, dsb). Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam papan nama tersebut berfungsi memberikan informasi tentang nama, kegiatan, dan konsep-konsep kepada masyarakat umum.

Dalam ilmu sosiolinguistik, Landry dan Bourhis (1997) menyatakan bahwa kajian lanskap linguistik memfokuskan pada perilaku berbahasa masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diperbandingkan penggunaan bahasa pada tataran ruang resmi dan tidak resmi. Pada tataran resmi (*official sign*) teks-teks diproduksi oleh pemerintah yang selanjutnya dikenal dengan konsep *Top Down*, sedangkan pada tataran tidak resmi (*non-official sign*) teks diproduksi oleh swasta atau individu yang selanjutnya dikenal

dengan konsep *Bottom-Up*. Selanjutnya, diungkapkan juga bahwa lanskap linguistik memiliki dua fungsi, yaitu fungsi informasional dan fungsi simbolis. Pada fungsi informasional, makna penanda membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat itu, sedangkan pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa sebagai kelompok pada papan petunjuk berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode dokumentasi berupa foto penggunaan bahasa ruang publik yang diproduksi oleh lembaga swasta yang ada di Kabupaten Gianyar yang selanjutnya merupakan objek penelitian yang dikenal dengan konsep *bottom up* dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Untuk mengukur tingkat keterkendalian penggunaan bahasa Indonesia pada penelitian ini menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas tiga variabel, yaitu (A) kaidah kebahasaan (dengan bobot 30%), (B) fisik kebahasaan (dengan bobot 50%), dan (C) tipografi kebahasaan (dengan bobot 20%). Pada variabel kebahasaan terdapat tiga indikator, yaitu ejaan, pilihan kata, dan struktur; variabel fisik kebahasaan meliputi tiga indikator, yaitu posisi penggunaan bahasa, ukuran huruf, dan warna huruf; variabel tipologi kebahasaan meliputi bahan, desain, dan kejelasan tulisan. Untuk setiap indikator diberikan nilai 10, 20, atau 30 sesuai dengan ketentuan penilaian.

Pemberian skor setiap variabel menggunakan rumus sebagai berikut.

$$N = \sum q \times \text{bobot}(\%)$$

Keterangan:

N = Nilai yang diperoleh setiap variabel

$\sum q$ = jumlah skor keseluruhan setiap indikator

Bobot (%) = Bobot yang diberikan pada setiap variabel

Nilai setiap variabel data dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$N = A + B + C$$

Adapun kriteria umum peringkat keterkendalian untuk ketiga variabel penggunaan bahasa pada media luar ruang (ruang publik) dalam penelitian ini, yaitu Terkendali A = Sangat Terkendali (rentang 2.601—3.000), Terkendali B = Cukup Terkendali (rentang (2.201—2.600), Terkendali C = Kurang Terkendali (rentang 1.800—2.200), dan Terkendali D = Sangat Kurang Terkendali (rentang 1.400—1.799). Sementara itu, untuk mengetahui perbandingan tingkat keterkendalian penggunaan

bahasa ruang publik antara lembaga swasta bidang usaha dan lembaga pendidikan swasta, digunakan rumus: $N = \sum q$: **Jumlah lembaga** dengan penetapan kategori sebagai berikut: Terkendali A = Sangat Terkendali (rentang 656—750), Terkendali B = Cukup Terkendali (rentang 562—655), Terkendali C = Kurang Terkendali (rentang 468—561), dan Terkendali D = Sangat Kurang Terkendali (rentang 375—467).

Selain penilaian tingkat keterkendalian penggunaan bahasa, penelitian ini juga mendeskripsikan tentang fenomena pemakaian bahasa yang ditemukan pada data sehingga diketahui adanya unsur-unsur penyusupan bahasa (bahasa daerah dan bahasa asing) dan faktor-faktor penyebab munculnya penggunaan berbagai macam bahasa pada data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia ruang publik pada lembaga swasta di Kabupaten Gianyar

Hasil pengukuran tingkat keterkendalian penggunaan Bahasa Indonesia pada media ruang publik lembaga swasta di Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil rekapitulasi nilai, skor yang diperoleh Kabupaten Gianyar adalah 2190. Capaian yang diperoleh wilayah ini ditinjau dari peringkat keterkendalian dapat dikategorikan sebagai wilayah terkendali C. Hal ini berarti penggunaan bahasa pada lembaga swasta dan lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Gianyar kurang terkendali. Secara fisik papan nama lembaga, nama sarana umum, nama jabatan, nama produk barang dan jasa, dan sarana informasi umum masih didominasi penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris) terutama pada lembaga usaha swasta yang berupa hotel dan penginapan. Sementara itu, penggunaan bahasa pada media luar ruang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Gianyar penggunaan bahasa asing tidak menunjukkan dominasinya, tetapi tipografi media luar ruang pada lembaga pendidikan sangat sederhana dan terkesan bersifat sementara.

Perbandingan tingkat keterkendalian penggunaan bahasa di ruang publik antara lembaga usaha swasta dan lembaga pendidikan swasta yang ada di Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Rekapitulasi Tingkat Keterkendalian Penggunaan Bahasa Lembaga Swasta di Kabupaten Gianyar

Lembaga Swasta	Variabel Penilaian			Jumlah	Nilai
	Kaidah Kebahasaan	Fisik Kebahasaan	Tipografi Kebahasaan		
Lembaga Pendidikan	471	282	310	1063	531,5
Lembaga Usaha	426	269	396	1127	375,6

Berdasarkan pada tabel di atas tampak perolehan nilai tingkat keterkendalian penggunaan bahasa pada media ruang publik yang diproduksi oleh lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Gianyar sebesar 531,5. Nilai tersebut dinyatakan bahwa penggunaan bahasa media ruang publik lembaga tersebut berada pada kategori kurang terkendali. Sementara itu, rekapitulasi hasil penilaian tingkat keterkendalian penggunaan bahasa ruang publik untuk lembaga usaha swasta yang ada di Kabupaten Gianyar diperoleh nilai sebesar 375,6 dan nilai tersebut masuk dalam kategori sangat kurang terkendali.

Perolehan nilai tersebut seperti tampak pada data yang berhasil dikumpulkan pada penelitian ini bahwa pada variabel kebahasaan masih ada penyimpangan pada tataran penerapan kaidah ejaan, sedangkan pada variabel fisik, ditemukan penggunaan bahasa lain selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris dan aksara Bali pada papan nama lembaga, papan petunjuk, nama sarana umum, nama jabatan, nama produk barang dan jasa, dan sarana informasi umum. Namun, penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Gianyar masih mendominasi, sedangkan pada lembaga usaha penggunaan bahasa asing lebih mendominasi dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia.

Penggunaan Bahasa Ruang Publik pada Lembaga Swasta di Kabupaten Gianyar

Berdasarkan data yang terkumpul, nama usaha (hotel) hampir semua menggunakan nama bahasa Indonesia, seperti Sapu Lidi, Nirmala, Hotel Gianyar, dan Bali Mulya. Namun, informasi penyerta pada papan nama tersebut ditemukan pelanggaran. Misalnya pada nama Sapu Lidi **Resort & Spa Gallery**, Nirmala **Guest House**, dan Bali Mulya **Collection**. Selain menggunakan bahasa Inggris, pola penulisan papan nama tersebut tidak sesuai dengan pola penulisan bahasa Indonesia yang benar, yaitu berpola “diterangkan-menerangkan (DM). Penggunaan istilah asing tersebut sudah

diserap dan dipadankan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *resor, galeri, penginapan, dan koleksi*. Demikian juga halnya pada papan petunjuk dan nama gedung yang ditemukan di lokasi penelitian, hampir semua menggunakan bahasa Inggris, seperti *front office, restaurant, meeting room, sales & marketing, fresh fruit, staff only, reception, parking area*, dan lain-lain.

Berbeda halnya dengan penggunaan bahasa ruang publik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Gianyar. Papan nama lembaga pendidikan swasta menggunakan huruf latin dan aksara Bali. Hal tersebut sebagai wujud penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1992 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 1995 tentang penulisan Papan Nama dengan Dwiaksara. Kedua bentuk kebijakan kebahasaan dan kesastraan itu merupakan salah satu wujud nyata dalam usaha membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Namun, pada papan petunjuk yang ada di lembaga pendidikan swasta tersebut hampir semua menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ditemukan juga penggunaan bahasa Inggris pada tempat praktik keahlian yang menunjang pembelajaran bidang pariwisata, seperti yang ada di laboratorium *front office*, seperti papan petunjuk yang bertuliskan *receptionist* dan *reservation*. Selain itu, juga ditemukan penerapan kaidah ejaan yang tidak tepat, seperti penggunaan tanda baca titik, koma, dan titik dua.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut menunjukkan terdapat pelanggaran terhadap keharusan dan kepatuhan penggunaan bahasa Indonesia. Kenyataan itu mempersempit ruang gerak bahasa Indonesia dan melemahkan eksistensi bahasa Indonesia di hadapan masyarakatnya sendiri. Pelanggaran penggunaan bahasa yang terjadi di ruang publik, ruang yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik lokal maupun asing itu menunjukkan tidak mengutamakan bahasa nasional (bahasa Indonesia) hanya demi gengsi dan nilai jual. Padahal, lembaga atau badan usaha tersebut dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia. Selain itu, pergeseran penggunaan bahasa Indonesia juga kerap dijumpai pada fasilitas publik lainnya, seperti rambu lalu lintas, papan-papan petunjuk, papan-papan peringatan, atau informasi pada produk barang dan jasa keluaran Indonesia. Fenomena itu semakin memprihatinkan karena terjadi di negara Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada media ruang publik yang diproduksi oleh lembaga swasta di wilayah Kabupaten Gianyar umumnya berada pada kategori kurang terkontrol dengan perbandingan bahwa lembaga pendidikan swasta berada pada kategori kurang terkontrol dan untuk lembaga swasta yang bergerak dalam bidang usaha (jasa) berada pada kategori sangat kurang terkontrol. Selain fenomena pengutamakan bahasa asing dan ketidaktaatan akan kaidah ejaan, tipografi media ruang publik tersebut juga terkesan sangat sederhana dan bersifat sementara sehingga ada indikasi bahwa tipografi media tersebut dapat diganti/diganti sewaktu-waktu.

Rujukan

- Ardhian, Dany dan Soemarlani. 2018. "Mengenal Kajian-Kajian Lanskap Linguistik dan Upaya Penataannya Dalam Ruang-Ruang Publik di Indonesia". *Yayasan Akrab Pekanbaru: Jurnal Akrab Juara Volume 3 Nomor 3 Edisi Agustus 2018* (170-181).
- Erikha, Fajar. 2018. "Konsep Lanskap Linguistik Pada Papan Nama Jalan Kerajaan (Râjamârga): Studi Kasus Kota Yogyakarta". *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Volume 8 Nomor 1 (2018)*: 38-52.
- Landry, Rodrigue and Bourhis, Richard Y. 1997. "Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study". *Journal of Language and Social Psychology* 16 (1): 23—49.
- Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1992 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 1995 tentang penulisan Papan Nama dengan Dwiaksara.
- Puzey, G. 2016. *Renaming as Counter Hegemony: The Cases of Noreg and Padania*. Dalam G. Puzey, & L. Kostanski, *Names and Naming: People. Places. Perceptions, and Power* (244—272). Bristol: Multilingual Matters.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wulansari, D.W. 2020. "Linguistik Lanskap di Bali: Tanda Multilingual dalam Papan Nama Ruang Publik". *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. Vol. 3 No. 2. April 2020 (420—429).